

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul Land Rent System dari Raffles ini memuat tiga pokok permasalahan : Pertama Latar belakang pelaksanaan sistem sewa tanah di Jawa; Kedua Aturan-aturan sistem sewa tanah dan praktek pelaksanaannya; Ketiga Penilaian terhadap keberhasilan pelaksanaan sistem sewa tanah di Jawa. Tujuan penulisan skripsi ini adalah mengetahui bagaimana pelaksanaan sistem sewa tanah yang dikenalkan Inggris dibawah Thomas Stamford Raffles selama masa pemerintahannya di Jawa. Sejalan dengan studi yang ditekuni penulis, skripsi inipun akan menekankan aspek historis yang berdasar pada sumber-sumber primer maupun sekunder yang tersedia. Melalui studi pustaka langkah-langkah penulisan yang ditempuh tidak lepas dari sistem metode sejarah, dengan harapan akan menghasilkan sebuah karya yang deskriptif-analitis.

Intisari skripsi ini dapat digambarkan sebagai berikut: Jatuhnya Jawa ke tangan Inggris pada September 1811, menandai suatu babak baru kolonialisme di Indonesia. Sesuai haluan politiknya yang liberal, selama kepemimpinannya, di Jawa Raffles banyak melakukan pembaharuan radikal dan salah satunya melalui sistem sewa tanah. Maksud penerapan sewa tanah tentu tidak lepas dari kepentingan pemerintah Inggris yaitu ingin menjadikan daerah koloni (Jawa) sebagai tempat pemasaran hasil industrinya. Untuk itu diperlukan suatu kondisi masyarakat yang mendukung, dengan tingkat kesejahteraan dan kemakmuran yang tinggi. Dengan kondisi semacam itu diharapkan daya beli masyarakat terhadap produk industri Inggris tinggi. Namun kenyataannya kondisi yang diharapkan tidak dijumpai dalam kehidupan masyarakat Jawa, akibat besarnya kekuasaan penguasa feodal atas kehidupan rakyat, dan sebagai solusinya harus dilakukan pembaharuan secara menyeluruh.

Atas dasar latar belakang kondisi itu, maka pembaharuan Raffles melalui sewa tanah diarahkan pada suatu perombakan yang bersendikan pada penghapusan segala bentuk sistem feodal, pelaksanaan sistem pemerintahan langsung, serta pengenalan sistem penanaman, pengelolaan dan perdagangan bebas. Pada periode awal pelaksanaan sewa tanah pemerintahan menerapkan sistem zamindari atau cara pemungutan sewa per desa. Prosedur pelaksanaannya pemerintah melalui perantara kepala desa langsung menyewakan tanah kepada rakyat. Sedang peran para bupati dan pembesar feodal lainnya diputuskan dalam kegiatan pemungutan pendapatan, sebab mereka dianggap sebagai sumber penindasan terhadap rakyat karena tidak kesewenang-wenangannya. Namun dalam pelaksanaan selanjutnya Raffles

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

menemukan banyak kelemahan dari sistem ini, salah satunya masih adanya peluang bagi kepala desa menindas rakyat sebagaimana yang dilakukan para bupati dulu.

Dengan bukti itu berarti tujuan utama pemerintah dalam melindungi rakyat dari penindasan penguasa pribumi belum terlaksana. Untuk itu Raffles kemudian berketetapan untuk mengubah pelaksanaan sewa tanah dengan sistem ryotwari atau cara pemungutan per individu. Prosedur pelaksanaannya, dalam menyewakan tanah pemerintah langsung berhubungan dengan rakyat, tanpa perantara pembesar pribumi siapapun. Sebaliknya rakyat dalam membayar sewa langsung kepada kolektor, sebagai petugas resmi pemungut pajak yang ditunjuk pemerintah. Sayangnya pelaksanaan sistem inipun mengalami kegagalan karena kendala teknis, akibatnya total pendapatan sewa tanah terus mengalami penurunan hingga berakhirnya pemerintahan Raffles di Jawa.

Melihat kenyataan ini dapat disimpulkan bahwa secara prinsipial penerapan sistem sewa tanah di Jawa gagal. Terbukti, secara finansial selama periode pelaksanaan sewa tanah di Jawa tidak mendapatkan surplus pendapatan bagi Inggris. Di samping itu maksud pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan tidak terlaksana, akibatnya target pemerintah pun untuk menjadikan Jawa sebagai tempat pemasaran industri Inggris tidak terealisasi.

Namun demikian tidak seluruh ide pembaharuan Raffles melalui sistem sewa tanah ini berdampak negatif. Sentuhan terdalem dari rangkaian program pembaharuan ini adalah semangat yang digarapnya yang mana merupakan hasil yang abadi, karena mampu menggerakkan imajinasi para pemimpin Belanda periode selanjutnya untuk berpikir dan bertindak liberal serta memperhatikan aspek humanistik dalam memerintah negeri ini (Indonesia).

ABSTRACT

RAFFLES' LAND RENT SYSTEM

Listyorini
Sanata Dharma University
Yogyakarta

This thesis aims to describe 1) the background of practicing land rent system, 2) the rules and practice of land rent system, 3) and the evaluation on the success of land rent system in Java in the period of Raffles.

The method of historical research uses library-research consisting of the primary and secondary sources available.

The result shows that in principle the practice of land rent system in Java under Lieutenant-Governor Raffles failed. The British Government failed to make Java a place for selling their industrial products. The Government failed to make Javanese society prosperous, because there was a powerful feudal authority. During the period of land rent system practice, the revenue was deficit.